



DEKONSTRUKSI IDENTITAS DALAM LANSKAP LINGUISTIK: ANALISIS SEMIOTIKA-FILOSOFIS AKSARA BALI DI RUANG PUBLIK

I Nengah Sueca¹, ²Ahmad Abdan Syakur,

³Putu Dewi Merlyna Yuda Pramesti, ⁴Kadek Wirahyuni, ⁵I Made Sutama

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Bahasa, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: ¹sueca@student.undiksha.ac.id, ²ahmad.abdan@student.undiksha.ac.id,

³dewi.merlyna@undiksha.ac.id, ⁴kadek.wirahyuni@undiksha.ac.id, ⁵made.sutama@undiksha.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 08-06-2026

Disetujui: 17-06-2026

Kata Kunci:

aksara Bali

semiotika

linguistik lanscap

Keywords:

Balinese script; semiotics;

linguistic landscape

ABSTRAK

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik, mengungkap makna semiotika-filosofis yang terkandung di dalamnya, serta memahami aksara Bali dalam merepresentasikan dan mendekonstruksi identitas budaya masyarakat Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif interpretatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, dokumentasi visual, dan studi pustaka. Objek penelitian meliputi papan nama sekolah, tempat suci, papan nama jalan, dan kantor pemerintahan di wilayah Denpasar, Karangasem, dan Bangli. Analisis data mengintegrasikan kerangka linguistik lanskap, semiotika, dekonstruksi, dan teori modal simbolik untuk membaca makna tanda, representasi identitas, dan relasi kekuasaan dalam penggunaan aksara Bali di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama kehadiran aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik. *Pertama*, posisi dominan-sakral pada ruang keagamaan, aksara Bali memiliki otoritas simbolik penuh sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan kosmologi masyarakat Bali. *Kedua*, posisi subordinat-dekoratif pada ruang pendidikan, pemerintahan, dan ruang publik umum, yang mana huruf Latin mendominasi sebagai sistem keterbacaan utama sementara aksara Bali berperan sebagai penanda identitas etnis yang bersifat representasional. *Ketiga*, posisi komodifikasi-performatif pada ruang wisata, yang mana aksara Bali difungsikan sebagai penanda eksotisme budaya yang bernilai jual dalam industri pariwisata. Temuan ini menunjukkan bahwa aksara Bali telah mengalami pergeseran dari sistem tulisan tradisional yang fungsional-komunikatif menuju medan produksi makna yang bersifat simbolik, ideologis, dan performatif. Identitas budaya Bali tidak hadir sebagai entitas yang esensial dan final, melainkan sebagai konstruksi semiotik yang terus diproduksi ulang dan didekonstruksi melalui interaksi antara tradisi, modernitas, birokrasi, dan globalisasi dalam lanskap linguistik ruang publik kontemporer.

Abstract: This study aims to analyze the use of Balinese script in the linguistic landscape of public spaces, to uncover the philosophical-semiotic meanings embedded within it, and to examine the extent to which Balinese script represents and deconstructs the cultural identity of Balinese society in the face of modernization and globalization. This study adopts a qualitative descriptive-interpretive approach, with data collected through direct field observation, visual documentation, and systematic library research. The objects of investigation comprise school signboards, sacred religious sites, street name signs, and government office buildings situated across the regions of Denpasar, Karangasem, and Bangli. Data analysis was conducted by integrating the theoretical frameworks of linguistic landscape, semiotics, deconstruction, and symbolic capital theory, with a view to examining sign meanings, identity representation, and power relations manifested in the use of Balinese script within public spaces. The findings identify three predominant patterns characterizing the presence of Balinese script in the public linguistic landscape. First, a dominant-sacred positioning in religious spaces, in which Balinese script commands full symbolic authority as an intrinsic and inseparable component of the belief system and cosmological worldview of Balinese society. Second, a subordinate-decorative positioning in educational, governmental, and general public spaces, in which Latin script prevails as the primary system of public legibility, while Balinese script functions

predominantly as a representational ethnic identity marker devoid of active communicative function. Third, a commodification-performative positioning in tourism spaces, in which Balinese script is strategically instrumentalized as a signifier of cultural exoticism carrying significant commercial value within the tourism industry. Collectively, these findings demonstrate that Balinese script has undergone a profound shift from a functional-communicative traditional writing system toward a field of meaning production that is inherently symbolic, ideological, and performative in character. Balinese cultural identity does not present itself as an essential, stable, or immutable entity, but rather as a semiotic construction that is perpetually reproduced and deconstructed through the complex interplay of tradition, modernity, bureaucracy, and globalization within the contemporary public linguistic landscape.



<https://doi.org/10.31764/telaah.vXiY.ZZZ>

the *CC-BY-SA* license



This is an open access article under

A. LATAR BELAKANG

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas, representasi budaya, dan simbol ideologi suatu masyarakat (Zaini dkk., 2022). Dalam konteks masyarakat multikultural, bahasa yang hadir di ruang publik memiliki makna sosial yang lebih luas karena dapat menunjukkan relasi kekuasaan, dominasi budaya, hingga upaya pelestarian identitas lokal. Kehadiran bahasa dalam papan nama jalan, gedung pemerintahan, pusat wisata, maupun fasilitas umum menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai lanskap linguistik (Landry & Bourhis, 1967). Lanskap linguistik tidak hanya memperlihatkan bentuk penggunaan bahasa, tetapi juga mencerminkan nilai, identitas, dan orientasi budaya masyarakat di suatu wilayah (Febriansyah dkk., 2025). Dalam perkembangannya, kajian linguistik lanskap semakin banyak digunakan untuk memahami hubungan antara bahasa, ruang, dan identitas sosial dalam kehidupan modern (Ardhian & Soemarlum, 2024). Salah satu unsur yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah penggunaan aksara daerah di ruang publik sebagai simbol budaya lokal. Sebagai contoh, penggunaan Aksara Bali yang tidak hanya dipandang sebagai sistem tulisan tradisional, tetapi juga sebagai representasi identitas budaya masyarakat Bali yang terus dipertahankan di tengah arus globalisasi dan modernisasi (Susianti dkk., 2025).

Fenomena penggunaan aksara Bali di ruang publik semakin terlihat dalam berbagai papan nama jalan, kantor pemerintahan, tempat wisata, hingga fasilitas umum di Bali. Penggunaan aksara Bali tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya lokal sekaligus implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi bahasa dan aksara daerah (Ediawan, 2020). Pemerintah Provinsi Bali secara aktif mendorong penggunaan

aksara Bali pada berbagai media publik sebagai bentuk penguatan identitas budaya daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Kehadiran aksara Bali berdampingan dengan bahasa Indonesia bahkan bahasa asing menunjukkan adanya dinamika bahasa dalam ruang sosial masyarakat Bali. Di sisi lain, fenomena tersebut juga memunculkan berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait fungsi simbolik dan efektivitas penggunaan aksara Bali di ruang publik. Sebagian masyarakat memandang penggunaan aksara Bali sebagai bentuk kebanggaan budaya dan pelestarian identitas lokal, namun sebagian lainnya menilai aksara tersebut lebih banyak berfungsi sebagai simbol visual dibandingkan media komunikasi yang benar-benar dipahami masyarakat (Wulansari, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aksara Bali di ruang publik tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga berkaitan dengan makna sosial, budaya, dan ideologis yang lebih kompleks.

Fenomena tersebut semakin menarik ketika dilihat dari sudut pandang semiotika dan filsafat identitas. Aksara Bali yang ditampilkan di ruang publik pada dasarnya bukan hanya sekadar tulisan, melainkan tanda budaya yang mengandung makna tertentu. Dalam kerangka semiotika Barthes (1967), tanda tidak hanya merepresentasikan denotasi, tetapi juga menyimpan lapisan makna konotasi dan ideologi yang terbentuk dalam konteks sosial dan budaya. Penempatan aksara Bali pada papan nama jalan, gedung pemerintahan, atau kawasan wisata dapat dipahami sebagai bentuk representasi identitas budaya Bali di hadapan masyarakat lokal maupun wisatawan. Namun demikian, makna identitas yang dibangun melalui penggunaan aksara Bali tidak selalu bersifat tetap dan tunggal. Dalam perspektif dekonstruksi Derrida (1976), makna tanda selalu bersifat tidak stabil dan terbuka terhadap penundaan

(différance), sehingga identitas budaya pun dapat mengalami pergeseran makna akibat pengaruh modernisasi, pariwisata, dan globalisasi yang semakin kuat (Widiyanto, 2024). Sejalan dengan itu, Ediawan (2020) menjelaskan bahwa aksara Bali yang semula memiliki fungsi sakral dan komunikatif dapat berubah menjadi simbol estetis atau bahkan komoditas budaya dalam ruang publik modern. Selain itu, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing di beberapa ruang publik juga memperlihatkan adanya relasi kuasa dalam penggunaan bahasa, sebagaimana dikonseptualisasikan Bourdieu (1991) melalui gagasan modal simbolik dan kekuasaan linguistik. Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan aksara Bali di ruang publik perlu dipahami secara lebih mendalam sebagai praktik simbolik yang berkaitan dengan konstruksi dan dekonstruksi identitas budaya masyarakat Bali.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap makna penggunaan aksara Bali di ruang publik, sehingga keberadaannya sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap visual semata. Banyak masyarakat yang melihat aksara Bali sebagai simbol budaya tanpa memahami nilai historis, filosofis, dan identitas yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penggunaan aksara Bali pada beberapa ruang publik terkadang lebih menonjolkan aspek formalitas kebijakan dibandingkan dengan fungsi komunikatifnya. Kondisi tersebut menyebabkan aksara Bali berpotensi mengalami pergeseran makna dari media identitas budaya menjadi sekadar ornamen simbolik. Terdapat pula keterbatasan penelitian yang mengkaji aksara Bali di ruang publik melalui pendekatan linguistik lanskap yang dipadukan dengan semiotika dan dekonstruksi identitas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelestarian bahasa daerah atau fungsi aksara Bali secara umum (Ediawan, 2020; Wulansari, 2020), sehingga aspek makna simbolik dan filosofisnya dalam ruang publik masih jarang dikaji secara kritis. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana aksara Bali membentuk, merepresentasikan, sekaligus mendekonstruksi identitas budaya dalam kehidupan masyarakat modern.

Sebagai upaya untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik lanskap dengan analisis semiotika-filosofis terhadap penggunaan aksara Bali di ruang publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna tanda, simbol, serta relasi identitas yang terkandung dalam penggunaan bahasa dan aksara di ruang sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan temuan Wulansari (2020) yang menunjukkan bahwa lanskap linguistik memiliki hubungan erat dengan

identitas budaya dan ideologi bahasa dalam masyarakat multibahasa. Penelitian tentang penggunaan bahasa daerah Bali, khususnya aksara Bali di ruang publik, umumnya menyoroti fungsi pelestarian budaya dan kebijakan bahasa daerah (Ediawan, 2020; Susianti dkk., 2025), sedangkan penelitian semiotika lebih banyak membahas makna simbolik tanda dalam media visual secara umum. Penelitian A. Putri dkk. (2026) juga menyoroti dekonstruksi identitas dalam lanskap linguistik pada penggunaan multibahasa di papan nama jalan, papan informasi, dan nama tempat. Selain itu, Ardhian & Soemarlani (2024) menunjukkan bahwa kajian lanskap linguistik dan upaya penataannya dalam ruang publik perlu dikaji secara mendalam. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan linguistik lanskap, semiotika-filosofis, dan dekonstruksi identitas terhadap penggunaan aksara Bali di ruang publik masih sangat terbatas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang tidak hanya melihat aksara Bali sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai tanda yang memproduksi dan mendekonstruksi identitas masyarakat Bali di ruang publik modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif linguistik lanskap dengan kerangka semiotika Barthes dan dekonstruksi Derrida untuk membaca makna identitas budaya melalui penggunaan aksara Bali dalam ruang sosial kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik serta mengungkap makna semiotika-filosofis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana aksara Bali merepresentasikan, membentuk, dan mendekonstruksi identitas budaya masyarakat Bali di tengah perubahan sosial modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian linguistik lanskap, semiotika, dan filsafat bahasa, khususnya yang berkaitan dengan identitas budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penggunaan aksara Bali secara lebih bermakna di ruang publik, sekaligus memberikan landasan bagi penguatan kebijakan pelestarian aksara daerah yang tidak sekadar bersifat simbolik. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan budaya populer yang semakin kuat, penelitian mengenai aksara Bali menjadi relevan untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal agar tidak kehilangan makna aslinya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Menurut Fiantika dkk. (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna, perspektif, dan interpretasi terhadap suatu objek penelitian. Sementara itu, Rudi dkk. (2020) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif interpretatif metode yang mendeskripsikan atau menceritakan mengenai pandangan atau pendapat dari objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan tanda, simbol, dan representasi identitas budaya dalam penggunaan aksara Bali di ruang publik. Objek penelitian meliputi papan nama jalan, papan informasi, fasilitas umum, dan berbagai tanda publik yang memuat aksara Bali di beberapa daerah di Bali, seperti Kota Denpasar, Karangasem, dan Bangli. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi visual berupa foto penggunaan aksara Bali di ruang publik, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah daerah, dan referensi lain yang relevan dengan linguistik lanskap, semiotika, dan identitas budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan semiotika dengan mengidentifikasi bentuk tanda, simbol, dan representasi visual aksara Bali dalam ruang publik. Selanjutnya, data diinterpretasikan melalui perspektif linguistik lanskap dan dekonstruksi identitas untuk memahami makna sosial, budaya, dan ideologis yang muncul dalam penggunaan aksara Bali tersebut. Analisis dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, klasifikasi data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap hubungan antara penggunaan aksara Bali, representasi identitas budaya, dan dinamika ruang publik masyarakat Bali kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aksara Bali dalam empat konteks lanskap linguistik ruang publik, yaitu papan nama sekolah, tempat suci (pura), papan nama jalan, dan lembaga pemerintahan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan linguistik lanskap (Landry & Bourhis, 1967), semiotika Barthes (1967), dan dekonstruksi identitas Derrida (1976) guna memahami makna simbolik, hierarki posisi visual, serta representasi identitas budaya yang terkandung dalam penggunaan aksara Bali. Melalui kajian

tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana aksara Bali merepresentasikan sekaligus mendekonstruksi identitas budaya masyarakat Bali di tengah perkembangan ruang publik modern.

1. Aksara Bali dalam Ruang Pendidikan: Papan Nama SMA Negeri 1 Rendang



Gambar 1. Papan Nama SMA Negeri 1 Rendang

Gambar 1 memperlihatkan papan nama SMA Negeri 1 Rendang yang menempatkan aksara Bali berdampingan dengan bahasa Indonesia dalam ruang pendidikan formal. Secara visual, tulisan SMA Negeri 1 Rendang menggunakan huruf Latin dengan ukuran paling besar dan paling dominan, sedangkan aksara Bali ditempatkan di bagian atas dan bawah papan dengan ukuran yang lebih kecil. Konfigurasi visual ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia menempati posisi fungsional sebagai sistem utama keterbacaan publik, sementara aksara Bali bergerak pada ranah simbolik kebudayaan.

Dalam kerangka linguistik lanskap, posisi hierarkis tersebut mencerminkan relasi kuasa antara bahasa nasional dan bahasa daerah sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bourdieu (1991) melalui gagasan modal simbolik linguistik. Huruf Latin diposisikan sebagai bahasa yang memiliki nilai tukar tinggi dalam ranah formal dan administratif, sementara aksara Bali berfungsi sebagai penanda identitas etnis yang nilainya lebih bersifat afektif dan representasional. Dalam perspektif semiotika Barthes (1967), aksara Bali pada papan sekolah ini beroperasi pada tataran konotasi, yakni sebagai penanda nilai-nilai kearifan lokal, kebanggaan daerah, dan keberpihakan pada pelestarian budaya — bukan sekadar sistem tulisan yang denotatif.

Lebih jauh, dalam perspektif dekonstruksi Derrida (1976), aksara Bali dalam konteks ini tidak pernah hadir sebagai makna yang tunggal dan stabil. Ia selalu berada dalam proses *différance* — penundaan makna yang terus-menerus — di antara

fungsi komunikatif yang tidak optimal dan fungsi representasional yang kuat secara simbolik. Identitas budaya Bali dalam ruang pendidikan ini tidak hadir sebagai entitas yang utuh, melainkan sebagai konstruksi visual yang terus dinegosiasikan dalam sistem tanda yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya institusional dalam mengonstruksi identitas lokal melalui aksara Bali masih terjebak dalam logika dekoratif, alih-alih menjadi praksis komunikasi yang hidup dan bermakna bagi warga sekolah.

2. Aksara Bali dalam Ruang Sakral: Papan Nama Pura Lempuyang Luhur



Gambar 2. Papan Nama Pura Lempuyang Luhur Sad Kahyangan

Sumber: <http://sinauwerno-wno.blogspot.com/2012/09/pura-paling-tua-pura-lempuyang-luhur.html>

Gambar 2 memperlihatkan papan nama Pura Lempuyang Luhur Sad Kahyangan yang menampilkan aksara Bali secara dominan dan memiliki intensitas simbolik paling kuat di antara keempat konteks yang diteliti. Dalam ruang sakral ini, aksara Bali tidak sekadar berfungsi sebagai penanda nama tempat, melainkan sebagai tanda yang menghubungkan dimensi material ruang dengan sistem kepercayaan, spiritualitas, dan kosmologi masyarakat Bali. Pola ini berbeda secara signifikan dari tiga konteks lainnya, di mana aksara Bali selalu berada pada posisi subordinat terhadap huruf Latin.

Dalam kerangka semiotika Barthes (1967), tanda-tanda visual yang hadir di ruang pura — meliputi warna emas, bentuk ukiran, dan estetika aksara yang khas — tidak hanya beroperasi pada tataran denotasi sebagai nama tempat, tetapi sekaligus memancarkan makna mitos tentang kesucian, kesakralan, dan otoritas spiritual yang melekat pada aksara Bali. Makna ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar informasi linguistik karena ia bersumber dari sistem nilai yang jauh lebih dalam dan telah terinternalisasi dalam praktik keagamaan masyarakat Bali selama berabad-abad.

Aksara Bali di sini bekerja sebagai apa yang oleh Barthes disebut sebagai bahasa mitos — sistem penandaan tingkat kedua yang naturalisasi konstruksi budaya menjadi sesuatu yang tampak alamiah dan niscaya.

Dari perspektif Derrida (1976), dominasi aksara Bali di ruang sakral justru memperlihatkan satu-satunya konteks di mana jejak (*trace*) makna orisinal aksara itu masih relatif terpelihara. Meskipun demikian, kehadiran huruf Latin sebagai elemen sekunder tetap menunjukkan bahwa ruang sakral pun tidak sepenuhnya imun terhadap penetrasi sistem tanda modern. Dengan kata lain, bahkan dalam konteks yang paling sakral sekalipun, makna tanda tidak pernah sepenuhnya stabil, melainkan selalu bergerak antara otoritas tradisi dan keterbukaan terhadap interpretasi baru. Hal ini menegaskan bahwa relasi antara aksara Bali dan huruf Latin bersifat dinamis dan kontekstual, bukan hierarkis yang beku.

3. Aksara Bali dalam Ruang Publik Umum: Papan Nama Jalan Legian



Gambar 3. Papan Nama Jalan Legian

Sumber:

<https://radarbali.jawapos.com/denpasar/1802020002/menarik-papan-nama-jalan-di-bali-wajib-aksara-bali>

Gambar 3 menampilkan papan nama Jalan Legian yang menunjukkan praktik bilingualisme dalam lanskap linguistik ruang publik umum melalui koeksistensi huruf Latin dan aksara Bali. Namun, relasi keduanya tidak dapat dibaca sebagai kesetaraan. Huruf Latin menempati posisi dominan sebagai penentu keterbacaan publik — berukuran lebih besar, lebih terang, dan lebih mudah dibaca dari jarak jauh — sementara aksara Bali hadir sebagai tanda tambahan yang merepresentasikan identitas kultural. Pola ini merupakan yang paling jamak ditemukan dalam konteks ruang publik umum di Bali, terutama pada kawasan wisata yang memiliki lalu lintas pengunjung lintas budaya yang tinggi.

Konteks ruang wisata seperti Jalan Legian menambahkan dimensi baru dalam dinamika linguistik lanskap, yakni dimensi komodifikasi budaya. Aksara Bali dalam konteks ini tidak hanya merepresentasikan identitas lokal, tetapi juga difungsikan sebagai penanda eksotisme dan kekhasan budaya Bali yang bernilai jual dalam industri pariwisata. Fenomena ini sejalan dengan konsep Barthes (1967) tentang mitos sebagai naturalisasi ideologi — di sini, mitos tentang 'keaslian' dan 'keunikan' budaya Bali diproduksi ulang melalui penggunaan aksara Bali pada ruang-ruang yang justru paling banyak dikonsumsi oleh wisatawan asing.

Dalam perspektif Derrida (1976), aksara Bali di ruang wisata mengalami apa yang dapat disebut sebagai *supplementarity* — ia hadir sebagai suplemen yang secara paradoks sekaligus melengkapi dan menggantikan sistem tanda yang lebih dominan. Aksara Bali tidak kehilangan makna, tetapi mengalami pergeseran fungsi dari sistem komunikasi aktif menuju sistem representasi yang bersifat performatif. Kehadirannya merupakan bentuk artikulasi identitas yang tidak stabil karena selalu dinegosiasikan antara tuntutan mobilitas modern, logika industri pariwisata, dan kebijakan budaya daerah (Pergub Bali No. 80, 2018). Identitas budaya Bali dalam konteks ini tidak pernah hadir sebagai sesuatu yang final, melainkan selalu terbentuk melalui proses relasional antartanda dalam ruang sosial yang terus berubah.

4. Aksara Bali dalam Ruang Institusional: Papan Nama Kantor Bupati Bangli



Gambar 4. Papan Nama Kantor Bupati Bangli
Sumber: <https://www.instagram.com/p/CXIpTPAIHKY>

Gambar 4 memperlihatkan papan nama Kantor Bupati Bangli yang menunjukkan penggunaan aksara Bali dalam ruang institusional. Huruf Latin tetap mendominasi sebagai sistem utama penyampaian informasi administratif — nama instansi, jabatan, dan alamat semuanya menggunakan huruf Latin sebagai wahana

keterbacaan utama — sedangkan aksara Bali hadir sebagai tanda yang mengandung muatan ideologis dan simbolik yang berkaitan dengan legitimasi identitas daerah.

Dalam perspektif semiotika Barthes (1967), tanda aksara Bali pada papan kantor pemerintah beroperasi secara ganda: secara denotatif ia menginformasikan nama instansi dalam aksara daerah, namun secara konotatif ia memproduksi pesan tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian budaya lokal. Pesan konotatif inilah yang sesungguhnya menjadi fungsi utama aksara Bali di ruang institusional — sebuah strategi produksi citra kekuasaan yang bekerja melalui visualitas dan representasi budaya. Dalam pengertian ini, aksara Bali difungsikan sebagai alat legitimasi simbolik yang memperkuat klaim pemerintah daerah sebagai pelindung dan penjaga kebudayaan Bali.

Dari sudut pandang Bourdieu (1991), penggunaan aksara Bali di ruang institusional merupakan manifestasi akumulasi modal simbolik melalui kapital budaya. Pemerintah daerah mengonversi kapital budaya berupa aksara Bali menjadi modal simbolik yang memperkuat legitimasi kekuasaan di hadapan masyarakat lokal. Sementara itu, dalam kerangka Derrida (1976), relasi ini tetap menunjukkan ketegangan antara fungsi administratif modern yang menuntut keterbacaan universal dan upaya pelestarian simbol budaya lokal. Aksara Bali tidak pernah sepenuhnya menjadi bahasa negara dalam ruang ini, melainkan selalu berada dalam ruang ambivalensi antara fungsi komunikasi dan fungsi legitimasi — antara bahasa yang digunakan dan bahasa yang dipamerkan.

Berdasarkan analisis terhadap keempat konteks di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik menunjukkan pola yang tidak seragam dan sangat bergantung pada konteks ruang serta relasi kuasa yang melingkupinya. Secara umum, ditemukan tiga pola utama: (1) aksara Bali dalam posisi subordinat dekoratif pada ruang pendidikan, pemerintahan, dan wisata; (2) aksara Bali dalam posisi dominan-sakral pada ruang keagamaan; dan (3) aksara Bali dalam posisi komodifikasi-performatif pada ruang wisata. Ketiga pola ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa aksara Bali telah mengalami pergeseran dari sistem tulisan tradisional yang fungsional menjadi medan produksi makna yang bersifat simbolik, ideologis, dan performatif dalam ruang publik modern.

Temuan penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik tidak dapat dipahami semata sebagai sistem tulisan yang stabil, melainkan sebagai praktik penandaan yang selalu bergerak dalam

produksi makna ideologis dan negosiasi identitas. Dalam kerangka linguistik lanskap (Landry & Bourhis, 1967), bahasa di ruang publik tidak pernah bersifat netral karena selalu terikat pada praktik sosial yang menghasilkan hierarki makna antara yang dominan dan yang ter subordinasi. Temuan ini sejalan dengan Karmini (2017) yang menegaskan bahwa bahasa dalam ruang publik berfungsi sebagai indikator identitas etnolinguistik sekaligus representasi kekuasaan simbolik dalam masyarakat.

Dominasi huruf Latin pada sebagian besar konteks ruang publik yang diteliti menunjukkan bahwa fungsi utama bahasa dalam lanskap tersebut masih berorientasi pada keterbacaan, mobilitas informasi, dan efisiensi komunikasi administratif. Aksara Bali secara konsisten berada pada posisi subordinat yang lebih bersifat dekoratif atau simbolik, bukan sebagai sistem komunikasi yang fungsional dan aktif. Kondisi ini mencerminkan hierarki bahasa yang oleh Bourdieu (1991) dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik — di mana bahasa yang memiliki modal simbolik lebih tinggi secara tidak langsung mendeligitimasi bahasa lain ke posisi marginal, meskipun proses ini berlangsung secara halus dan tidak disadari.

Pola yang berbeda ditemukan pada ruang sakral, di mana aksara Bali justru tampil dominan dan memiliki posisi setara atau lebih tinggi dibandingkan huruf Latin. Temuan ini mengonfirmasi argumen Ediawan (2020) bahwa geosemiotika ruang publik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan jenis ruang yang menentukan konfigurasi bahasa. Dalam ruang keagamaan, aksara Bali tidak hanya menjadi penanda identitas budaya, tetapi menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan, ritual, dan spiritualitas masyarakat Bali — sebuah dimensi yang tidak dimiliki oleh huruf Latin. Hal ini menunjukkan bahwa modernitas tidak sepenuhnya menghapus aksara lokal, melainkan membatasi ruang distribusinya pada domain-domain yang memiliki muatan sakral atau emosional yang kuat.

Pada ruang pendidikan dan pemerintahan, aksara Bali muncul dalam bentuk integrasi simbolik yang memperlihatkan upaya institusional dalam pelestarian budaya, namun integrasi tersebut belum sepenuhnya fungsional karena huruf Latin tetap menjadi unsur utama komunikasi. Kondisi ini mencerminkan apa yang dalam kajian sosiologi bahasa disebut sebagai folklorisasi bahasa, yakni ketika bahasa lokal dipertahankan sebagai simbol estetika tanpa fungsi praktis yang kuat (Susianti dkk., 2025). Aksara Bali lebih berperan sebagai legitimasi identitas daerah dan pembangun citra institusi daripada sebagai sistem komunikasi yang benar-benar hidup dalam keseharian warga institusi tersebut.

Dalam perspektif semiotika Barthes (1967), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aksara Bali tidak dapat dipahami semata sebagai tanda linguistik yang merepresentasikan bunyi atau sistem tulisan, tetapi juga sebagai tanda ideologis yang memproduksi makna tentang Bali (*Balineseness*) dalam ruang sosial. Elemen visual seperti warna, posisi, ukuran, dan estetika aksara tidak sekadar bersifat ornamental, melainkan turut membentuk struktur makna yang menentukan bagaimana identitas budaya dikonstruksi dan dipersepsikan dalam ruang publik. Pada tataran mitos, aksara Bali menjadi wahana di mana konstruksi budaya — tentang keunikan, kesakralan, dan keindahan Bali — dinaturalisasi sedemikian rupa sehingga tampak sebagai sesuatu yang alamiah dan niscaya, bukan sebagai produk relasi kuasa yang dapat dipersoalkan.

Namun, makna tersebut tidak pernah hadir sebagai sesuatu yang tetap dan final. Dalam kerangka dekonstruksi Derrida (1976), aksara Bali selalu berada dalam kondisi *différance* — penundaan dan perbedaan makna yang terus-menerus — karena makna sebuah tanda tidak pernah hadir secara penuh dalam dirinya sendiri, melainkan selalu ditentukan oleh perbedaannya dengan tanda-tanda lain dalam sistem. Aksara Bali memperoleh maknanya justru karena perbedaannya dengan huruf Latin: ia bermakna sebagai penanda ke-lokal-an justru karena Latin menandai ke-modern-an, ke-nasional-an, dan ke-universal-an. Relasi diferensial inilah yang menjadikan aksara Bali sebagai tanda yang dinamis dan tidak stabil secara ontologis.

Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lanskap linguistik Bali merupakan arena negosiasi yang kompleks antara tradisi dan modernitas, antara identitas lokal dan tuntutan globalisasi, antara pelestarian budaya dan komodifikasi pariwisata. Ardhan & Soemarlum (2024) menegaskan bahwa lanskap linguistik merupakan ruang dinamis di mana bahasa menjadi alat negosiasi identitas, ideologi, dan kekuasaan dalam masyarakat multibahasa. Aksara Bali dalam kondisi ini berada dalam posisi ambivalen: di satu sisi menjadi simbol resistensi budaya lokal terhadap arus homogenisasi global, namun di sisi lain juga terkooptasi dalam sistem modern yang menjadikannya sebagai elemen estetis dan komoditas pariwisata.

Implikasi dari temuan ini bagi kebijakan pelestarian aksara Bali sangat signifikan. Pelestarian aksara Bali tidak cukup jika hanya dipahami sebagai kewajiban simbolik dalam regulasi daerah (Pergub Bali No. 80, 2018), melainkan perlu diiringi dengan penguatan fungsi komunikatif aksara tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa adanya penguatan literasi aksara Bali yang sistematis di

ruang pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan publik, aksara Bali akan terus mengalami marginalisasi fungsional — tetap hadir secara visual, tetapi kehilangan daya hidupnya sebagai sistem komunikasi yang bermakna. Dengan demikian, kajian linguistik lanskap yang dipadukan dengan semiotika-filosofis sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini menawarkan perspektif kritis yang penting untuk memahami dan merancang kebijakan pelestarian bahasa daerah yang lebih substantif dan tidak sekadar dekoratif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Putri dkk. (2025) yang menekankan bahwa dekonstruksi identitas dalam lanskap linguistik multibahasa mencerminkan dinamika relasi kuasa yang tidak pernah bersifat stabil. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa identitas budaya Bali tidak pernah hadir sebagai entitas yang esensial, monolitik, dan final. Ia selalu merupakan hasil dari proses produksi dan reproduksi makna yang berlangsung melalui praktik semiotik dalam jaringan relasi sosial, budaya, dan kekuasaan yang dinamis — sebuah proses yang akan terus berlangsung selama aksara Bali masih hadir dalam lanskap linguistik ruang publik kontemporer.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aksara Bali dalam lanskap linguistik ruang publik tidak dapat dipahami sebagai sistem komunikasi yang stabil dan netral, melainkan sebagai praktik penandaan yang terus memproduksi, menegosiasikan, dan mendekonstruksi makna dalam relasi sosial, budaya, dan kekuasaan yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan tiga pola utama kehadiran aksara Bali: (1) posisi dominan-sakral pada ruang keagamaan, di mana aksara Bali memiliki otoritas simbolik penuh sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan kosmologi masyarakat Bali; (2) posisi subordinat-dekoratif pada ruang pendidikan, pemerintahan, dan ruang publik umum, di mana huruf Latin mendominasi sebagai sistem keterbacaan utama sementara aksara Bali berperan sebagai penanda identitas etnis yang bersifat representasional; serta (3) posisi komodifikasi-performatif pada ruang wisata, di mana aksara Bali difungsikan sebagai penanda eksotisme budaya yang bernilai jual dalam industri pariwisata. Secara keseluruhan, identitas budaya Bali melalui aksara Bali tidak hadir sebagai entitas yang esensial, monolitik, dan final, melainkan sebagai konstruksi semiotik yang terus diproduksi ulang dan didekonstruksi melalui interaksi antara tradisi, modernitas, birokrasi, dan globalisasi. Lanskap linguistik Bali merupakan arena negosiasi yang

dinamis antara pelestarian identitas lokal dan tuntutan homogenisasi global, antara fungsi komunikatif bahasa dan komodifikasinya, serta antara kebijakan budaya yang bersifat simbolik dan kebutuhan akan penguatan literasi aksara yang substantif dalam kehidupan masyarakat Bali kontemporer.

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran kepada beberapa pihak. Bagi pemerintah daerah, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 perlu diperkuat tidak hanya pada aspek kehadiran visual aksara Bali, tetapi juga pada penguatan fungsi komunikatifnya melalui standarisasi, peningkatan keterbacaan publik, dan konsistensi penerapan di seluruh lanskap linguistik resmi daerah. Bagi institusi pendidikan, aksara Bali perlu diintegrasikan sebagai bagian substantif dari kurikulum literasi budaya, bukan sekadar identitas visual pada papan nama, sehingga generasi muda memiliki kompetensi literasi aksara yang fungsional. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas melalui pendekatan komparatif antarwilayah, studi longitudinal perubahan lanskap linguistik, serta eksplorasi ruang digital sebagai arena baru produksi dan reproduksi identitas budaya Bali di era kontemporer.

REFERENSI

- [1] 1) Ardhian, D., & Soemarlum. (2024). Mengenal Kajian Lanskap Linguistik dan Upaya Penataannya Dalam Ruang-Ruang Publik di Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 9(4), 989–1000.
- [2] 2) Barthes, R. (1967). *Elements of semiology* (A. Lavers & C. Smith, Trans.). Dalam *Journal of Language and Social Psychology* (Nomor 1). Hill and Wang.
- [3] 3) Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Dalam *Journal of Language and Social Psychology* (Nomor 1). Polity Press.
- [4] 4) Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Dalam *Journal of Language and Social Psychology* (Nomor 1). Johns Hopkins University Press.
- [5] 5) Ediawan, I. N. T. (2020). Sekaha Teruna dalam Lanskap Linguistik Bali: Analisis Sosio-Onomastika terhadap Pola Penamaan dan Identitas Budaya. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu (SNBI) XVII*, 758–769.
- [6] 6) Febriansyah, R., Santoso, T., & Zeyhudan, A. (2025). Eksplorasi Lanskap Linguistik: Potret Keberlangsungan Bahasa Lokal dalam Modernitas Area Wisata di Manokwari. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, 11(2), 1681–1695. <https://e-journal.my.id/onoma>
- [7] 7) Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT.

- Global Eksekutif Teknologi.
www.globaleksekutifteknologi.co.id
- [8] 8) Karmini, N. N. (2017). Fungsi Dan Makna Sastra Bali Tradisional Sebagai Pembentuk Karakter Diri. *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, 32(2), 149–161.
- [9] 9) Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1967). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49.
- [10] 10) Pergub Bali No. 80. (2018). Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Dalam *Journal of Language and Social Psychology* (Nomor 1).
- [11] 11) Putri, A., Saifuddin, M. H., & Yunus, S. (2026). Dekonstruksi Identitas dan Pemberontakan Tokoh Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang, Saya Monyet Karya Djenar Maesa Ayu: Kajian Kritik Sastra Feminisme. *Psikosospen: Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 2(1), 475–492.
- [12] 12) Putri, A. Y., Purnomo, M. E., Sholikhah, H. A., & Salsabila, N. (2025). Dinamika Multibahasa di Ruang Publik Kota Palembang Sebagai Cermin Identitas dan Globalisasi: Kajian Lanskap Linguistik. *Linguistik Indonesia*, 43(2), 361–375.
- [13] 13) Rudi, Yakob, M., & Effendi, D. I. (2020). Alih Kode dan Campur Kode Dalam Tuturan Masyarakat Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa. *Jurnal Samudra Bahasa*, 4(2), 36–52.
- [14] 14) Susianti, H. W., Purwanti, C., & Utama, M. (2025). Lanskap Linguistik di Kawasan Wisata Sanur: Kajian Kontestasi Bahasa. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 566–580. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5954>
- [15] 15) Widiyanto, G. (2024). Pemakaian Bahasa di Madrasah: Kajian Lanskap Linguistik Sekolah. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya* 22, 171–180. www.mtsn17jkt.sch.id,
- [16] 16) Wulansari, D. W. (2020). Linguistik Lanskap di Bali: Tanda Multilingual Dalam Papan Nama Ruang Publik. *Jurnal Kredo: Bahasa dan Sastra*, 3(2), 420–429. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>
- [17] 17) Zaini, H., Ubaidillah, Herniti, E., Fitriyah, T., & Fatah, A. (2022). *Refleksi Kajian Bahasa, Sastra dan Budaya*. Penerbit IDEA Press Yogyakarta.